

Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Negara Indonesia

Nasya Handini¹, Mely Darwina², Yudistira³, Mellyana Candra⁴

Universitas Maritim Raja Ali Haji, nhandini@student.umrah.ac.id, mdarwina@student.umrah.ac.id, yudistira@student.umrah.ac.id, mellyana1001@gmail.com

Abstract Penelitian ini mengeksplorasi dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Meskipun negara ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan penurunan angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan tetap menjadi masalah yang serius. Data menunjukkan bahwa 1% populasi terkaya menguasai 46,6% dari total kekayaan. Kebijakan fiskal, melalui pajak progresif dan pengeluaran sosial, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan yang efektif. Namun, tantangan seperti rendahnya kepatuhan pajak, sistem perpajakan yang kurang progresif, dan distribusi sumber daya yang tidak merata masih ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada dampak positif, seperti penurunan indeks Gini dan pengurangan kemiskinan, diperlukan untuk memperbaiki administrasi perpajakan, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan alokasi pengeluaran sosial ke sektor Pendidikan dan Kesehatan. Kebijakan fiskal yang tepat dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang inklusif di Indonesia.

Keywords Kebijakan fiskal, ketimpangan ekonomi, redistribusi pendapatan, pajak progresif, pengeluaran sosial

Corresponding Author

First name Last name
Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, memiliki tingkat krisis dalam pertumbuhan ekonomi beberapa waktu terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia juga didorong oleh penurunan tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk yang tergolong miskin di Indonesia berkurang dari 54 juta pada tahun 1997 menjadi 25, 90 juta pada tahun 2023 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Meskipun Indonesia berhasil mencapai peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan, hal ini tidak sejalan dengan penurunan ketimpangan pendapatan yang terjadi di negara ini.

Terdapat hubungan negatif antara pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, dengan nilai 0,41 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup efektif dalam



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

mengatasi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan yang signifikan merugikan Masyarakat, sementara pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak memberikan dampak yang berarti bagi kelompok berpendapatan rendah. Birdsall (2005) mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sejarah menunjukkan contoh yang jelas, seperti perbandingan antara Korea Selatan dan Filipina. Kedua negara ini memiliki kondisi ekonomi yang serupa pada tahun 1960, tetapi kini terdapat kesenjangan yang besar. Salah satu faktor utama mempengaruhi perbedaan ini adalah tingkat ketimpangan pendapatan di awal perkembangan, di mana Korea Selatan memiliki distribusi pendapatan yang lebih baik dibandingkan Filipina (Benabo, 1996). Todaro dan Smith (2006) juga menekankan bahwa ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi, alokasi sumber daya yang tidak optimal, dan dapat mengganggu stabilitas sosial.

Ketimpangan ekonomi adalah masalah penting yang terus menjadi tantangan utama diberbagai negara berkembang. Ketidaksetaraan ini terlihat dari distribusi pendapatan yang tidak seimbang, perbedaan dalam akses terhadap pendidikan dan layanan Kesehatan, serta adanya disparitas yang signifikan dalam peluang ekonomi. Berdasarkan Global Wealth Report 2018 yang diterbitkan oleh Credit Suisse, 1% populasi terkaya di Indonesia menguasai 46,6% dari total kekayaan penduduk dewasa, sementara 10% orang terkaya menguasai 75,3% dari total kekayaan tersebut. Hal ini, menunjukkan bahwa segmen kaya di negara ini memperoleh manfaat yang signifikan dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kondisi ini mencerminkan tingginya ketimpangan Indonesia, yang berpotensi menjadi isu serius di masa mendatang. Tambunan (2001a) mengemukakan bahwa ketimpangan dan kesenjangan ekonomi merupakan dua tantangan utama yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang, yang ditandai dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat ekonomi yang pesat dapat dicapai selama fase pembangunan, hal ini sering kali disertai dengan masalah seperti pengangguran, kemiskinan di daerah pedesaan, distribusi pendapatan yang tidak merata, serta ketidakseimbangan structural (Sjahrir, 1986).

Kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan yang efektif, terutama di negara yang berkembang, melalui dua instrument utama; perpajakan progresif dan pengeluaran sosial. perpajakan progresif mengenakan beban pajak yang lebih tinggi pada individua atau entitas dengan pendapatan yang lebih tinggi, bertujuan mengurangi disparitas pendapatan. Sementara itu, pengeluaran sosial, seperti subsidi, dan bantuan langsung tunai, serta investasi dalam pendidikan dan kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka (Zulma, 2020; Imtiyazari, 2023).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan fiskal untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di negara ini. Beberapa Langkah yang diambil meliputi redistribusi pendapatan melalui pajak progresif, pemberian subsidi disektor-sektor yang kurang berkembang, serta pengeluaran publik yang diarahkan kepada sektor-sektor yang memerlukan dukungan (Dwi, 2023). Namun, penelitian oleh Alfirman et al., (2015) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan fiscal yang diterapkan memberikan dampak positif, hal ini belum cukup untuk mengurangi ketimpangan ekonomi secara signifikan. Pada penelitian tersebut mencatat bahwa kebijakan fiskal berhasil menurunkan indeks Gini dari 0,394 menjadi 0,370 dan mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia dari 12,1% menjadi 10,5%. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa banyak warga Indonesia yang tidak membayar pajak penghasilan, dan 40% dari populasi miskin terpengaruh oleh kemiskinan yang disebabkan oleh pajak dan transfer.

Dalam konteks negara berkembang, upaya redistribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan demografi. Menurut studi Inndonesia Treasury Review (2023), faktor-faktor seperti tingkat Produk Domestik Bruto (PDB), demografi, dan good governance berpengaruh signifikan terhadap upaya pengumpulan pajak di Asia Pasifik. Negara dengan PDB lebih tinggi memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mengumpulkan pajak dan melakukan pengeluaran sosial yang lebih besar. Sebaliknya, negara dengan PDB rendah menghadapi kesulitan dalam pengumpulan pajak dan memiliki pengeluaran sosial yang terbatas, sehingga ketimpangan ekonomi tetap menjadi masalah serius (Fahmi, 2019). Upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di negara berkembang sangat bergantung pada penerapan good governance. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan tata kelola pemerintah yang baik, hal ini mencakup aspek seperti, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi Masyarakat cenderung lebih sukses dalam melaksanakan kebijakan fiscal yang efektif. Di negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pengeluaran sosial biasanya lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga dampak positif terhadap ketimpangan ekonomi lebih terasa (Nusiantari & Swasito, 2020). Sebaliknya, di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, penggunaan anggaran public sering kali disalahgunakan, dan kebijakan redistribusi tidak dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Di Indonesia, kebijakan fiskal telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Bappenas (2020), pemerintah telah berusaha meningkatkan pengeluaran sosial dan memperbaiki sistem perpajakan untuk mengurangi ketimpangan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan, seperti ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik. Temuan oleh Ravallion dan Chen (2007)

mendukung pernyataan bahwa peningkatan akses terhadap layanan dasar berpotensi mengurangi ketimpangan.

Kebijakan ekonomi memiliki peranan penting karena tidak semua kebijakan dapat berjalan sesuai rencana. Kebijakan ini menjadi dasar bagi semua aktivitas yang berkaitan dengan perekonomian, baik skala kecil maupun besar. Oleh karena itu, hubungan antara politik dan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal, sangat relevan. Menurut Rahayu dan Ani Sri (2014), kebijakan fiskal adalah langkah yang diambil pemerintahan untuk mengarahkan perekonomian negara maju kondisi yang lebih baik dengan menyesuaikan pendapatan dan belanja pemerintah. Menurut Musgrave (1959), terdapat tiga fungsi utama dari kebijakan fiskal, yaitu alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pengeluaran pemerintah difokuskan pada program sosial dan Pembangunan infrastruktur dapat membantu mengurangi ketimpangan. Disisi lain, sistem perpajakan yang bersifat regresif dapat memperburuk kondisi ketimpangan tersebut. Tugas negara adalah mengelola kegiatan ekonomi untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu langkah untuk mengatasi ketimpangan pendapatan adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal yang sehat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur penerimaan, seperti pajak, dan pengeluaran, yang berpengaruh pada pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi, dan distribusi pendapatan (Nasution, 2020). Selain itu, pelaksanaan kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai stabilitas dan pembangunan (Damanhuri dan Findi, 2014).

Struktur perpajakan di Indonesia berkontribusi terhadap kepentingan pendapatan. Penelitian oleh Piketty dan Saez (2003) mengindikasikan bahwa sistem perpajakan yang progresif dapat membantu mengurangi ketimpangan. Namun, di Indonesia sistem perpajakan masih dianggap kurang progresif, dengan sebagian besar pendapatan pajak berasal dari pajak konsumsi yang bersifat regresif (OECD, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan sangat di perlukan untuk mencapai tujuan pengurangan ketimpangan.

Beberapa dari studi empiris telah dilakukan untuk mengevaluasi dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan di Indonesia. penelitian oleh Suryahadi et al (2019) menemukan bahwa peningkatan pengeluaran sosial memiliki hubungan negatif dengan ketimpangan, sementara pengurangan pajak untuk kelompok erpenghasilan tinggi dapat meningkatkan ketimpangan. Selain itu, analisis dari World Bank (2021) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang inklusif dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis pengaruh kebijakan fisikl terehadap ketimpangan ekonomi di negara Indonesia. Metode studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dan berbagai sumber, seperti jurnal akademis, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Terdapat empat tahap yang perlu dilakukan dalam studi pustaka, pertama menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, selanjutnya menyusun bibliografi kerja untuk mengorganisasi sumber-sumber yang akan digunakan, tahap ketiga adalah mengatur waktu dengan baik agar proses penelitian berjalan lancar, terakhir membaca dan mencatat materi penelitian yang relevan (Menurut Zed, 2004). Peneliti juga melakukan analisis data yaitu dengan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Peneliti juga akan mengkategorikan data berdasarkan tema-tema seperti efektivitas pajak progresif, dampak pengeluaran sosial, dan tantangan dalam implementasi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah, secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Sem Rantebua et al., 2020). Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan fiskal dapat dirancang dan diimplementasikan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

3.1 Kebijakan Fiskal di Indonesia

Kebijakan fiskal di Indonesia merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara, dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Menurut Rantebua (2020), kebijakan ini berfungsi untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada dampak sosial yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut.

Sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan pengeluaran dan penerimaan setiap tahunnya. Samuelson dan Nordhaus (1997) menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran yang bertujuan untuk mengatur fluktuasi siklus bisnis. Dalam konteks ini, APBN memiliki beberapa fungsi, seperti otorisasi, perencanaan, dan pengawasan (RI, 2003), yang memperkuat peran pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi.

3.2 Tantangan dalam Kebijakan Fiskal

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan fiskal Indonesia adalah ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Zulma (2020) menekankan bahwa kebijakan fiskal harus mampu mereduksi ketimpangan pendapatan melalui mekanisme redistribusi, seperti pajak progresif dan pengeluaran sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian Widiarti dan Subekti (2020), yang menunjukkan bahwa administrasi perpajakan yang efisien dan transparan dapat meningkatkan dampak redistributif dari pajak. Ketidakmerataan ini menjadi semakin mengkhawatirkan, terutama di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator ketidakmerataan pendapatan yang signifikan adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Alfirman et al. (2015) mencatat bahwa banyak warga yang tidak membayar pajak penghasilan, yang berakibat pada peningkatan ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pajak progresif dirancang untuk mereduksi ketimpangan, efektivitasnya dapat terhambat oleh rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian oleh Nusiantari dan Swasito (2020) mencatat bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak dan kualitas administrasi perpajakan dapat mengurangi potensi penerimaan pajak yang diperlukan untuk mendanai program-program sosial. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak melalui pendidikan perpajakan dan transparansi menjadi sangat penting. Pendidikan perpajakan yang baik dapat membantu masyarakat memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi.

Dalam konteks pengeluaran sosial, kebijakan yang diarahkan untuk program-program pendidikan dan kesehatan juga sangat vital. Ma'ruf dan Andriansyah (2022) menjelaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah di sektor-sektor ini selama masa pandemi COVID-19 telah berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat sasaran dapat memberikan manfaat langsung kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di masa krisis.

3.3 Optimalisasi Kebijakan Fiskal

Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berpotensi menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Nasution (2020) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, pemerintah dapat memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian.

Kebijakan fiskal di Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek redistribusi yang adil. Dalam hal ini, pajak progresif berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial. Widiarti dan Subekti (2020) berpendapat bahwa sistem perpajakan yang efektif harus mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Tanpa dukungan dari sistem administrasi perpajakan yang baik, potensi kebijakan fiskal untuk mengurangi ketimpangan akan terhambat.

Selanjutnya, pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran juga tidak bisa diabaikan. Ketika masyarakat melihat bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara efisien untuk program-program yang bermanfaat, mereka cenderung lebih mendukung kebijakan perpajakan. Fahmi (2019) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal juga sangat penting. Masyarakat yang terlibat akan lebih memahami dan mendukung kebijakan yang diterapkan. Sutikno (2020) menyatakan bahwa pemberian informasi yang jelas dan aksesibilitas terhadap data anggaran dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengeluaran pemerintah.

Untuk mencapai tujuan redistribusi pendapatan yang diinginkan, pemerintah perlu melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dan pengeluaran publik. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dan menyesuaikannya dengan konteks lokal, Indonesia dapat memperbaiki efektivitas kebijakan fiskal. Imtiyazari (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas administrasi perpajakan dan pengelolaan anggaran yang transparan dapat memperkuat dampak redistributif dari kebijakan fiskal.

Akhirnya, kebijakan fiskal yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ini bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan memperhatikan semua faktor ini, Indonesia dapat menciptakan sistem kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan adil.

4. CONCLUSION

Dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, meskipun

masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Pertama, sistem perpajakan yang kurang progresif dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menghambat efektivitas redistribusi pendapatan. Kedua, meskipun pengeluaran sosial telah membantu menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan, alokasinya belum sepenuhnya tepat sasaran. Ketiga, tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk aspek transparansi dan akuntabilitas, merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal. Oleh karena itu, untuk mencapai pengurangan ketimpangan ekonomi yang lebih signifikan, diperlukan reformasi dalam sistem perpajakan, optimalisasi pengeluaran sosial, dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Dengan langkah-langkah tersebut, yang diharapkan kebijakan fiskal dapat lebih efektif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil di Indonesia.

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, pemerintah perlu melakukan perbaikan pada sistem perpajakan dengan menerapkan tarif yang lebih tinggi dan menyederhanakan proses pembayaran pajak. Anggaran untuk bantuan sosial, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, harus lebih terarah, dengan fokus pada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk mencegah kebocoran dana. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaat dari program-program pemerintah juga perlu ditingkatkan. Dengan langkah-langkah praktis ini, kebijakan fiskal dapat lebih efektif dalam menciptakan pemerataan ekonomi.

REFERENCES

- Adzam, M., Etania, A. R., & Alviyani, F. A. (2024). Pentingnya Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 212-220.
- Agussalim, A., Nursini, N., Suhab, S., Kurniawan, R., Samir, S., & Tawakkal, T. (2024). The Path to Poverty Reduction: How Do Economic Growth and Fiscal Policy Influence Poverty Through Inequality in Indonesia?. *Economies*, 12(12), 316.
- Darmawan, M. A. (2024). *Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Tingkat Ketimpangan Antar Provinsi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-9.
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurohman. (2024). Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1-33.

- Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., Muliana, R. S., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2023). Peran kebijakan fiskal terhadap perekonomian di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2986-2997.
- Musgrave, R. A. (1959). The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy. McGraw-Hill.
- Nasution, A. R., Hutabarat, F. B., Wati, F., Kristiani, M., Rina, R., Diani, S., & Akmalia, U. (2024). Analisis Hubungan Antara Pajak Progresif dan Ketimpangan Serta Kaitannya Dengan Pilihan Publik. *Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 879-885.
- Norrahman, R. A. (2024). Analysis of the Impact of Fiscal Policy on Economic Growth in Indonesia. *Journal of Scientific Interdisciplinary Vol*, 1(1).
- Piketty, T., & Saez, E. (2003). Income Inequality in the United States, 1913-1998. *Quarterly Journal of Economics*, 118(1), 1-39.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1-10.
- Setiady, T. (2023). Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Yustitia*, 9(1), 1-23.
- Suryahadi, A., et al. (2019). The Impact of Social Protection on Inequality in Indonesia. SMERU Research Institute.
- World Bank. (2021). Indonesia Economic Prospects: Rebuilding from the Pandemic. World Bank Publications.
- Yuliani, N. M., Paturochman, I. R., Mubarok, A. T., & Muzaki, R. A. (2025). KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGATASI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 296-300.
- Zai, S., & Sabailaket, A. S. (2024). Analisis Peran Kebijakan Fisikal Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Negara Berkembang. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 8-14.
- Zai, S., & Sabailaket, A. S. (2024). Analisis Peran Kebijakan Fisikal Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Negara Berkembang. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 8-14.